

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian yang telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 dapat digunakan sebagai instrumen penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia berat di masa lalu. Dalam konteks sistem perundang-undangan Indonesia, Keppres ini memiliki legitimasi karena dikeluarkan dalam rangka melaksanakan tugas presiden sebagai kepala pemerintahan tertinggi. Meskipun kontroversial, Keppres ini memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur mekanisme penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat, sehingga dapat berfungsi sebagai dasar hukum dalam upaya penyelesaian tersebut. Kategorisasi Keppres ini sebagai "regeling" juga menunjukkan bahwa ia memiliki substansi pengaturan yang sesuai dengan fungsi hukum dalam sistem tata negara Indonesia.
2. Penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tidak serta merta menutup pintu untuk penyelesaian secara yudisial. Meskipun Keputusan Presiden ini menawarkan alternatif penyelesaian non-yudisial yang dapat mempercepat proses keadilan, tetap ada ruang dan kemungkinan bagi proses hukum untuk dilanjutkan, terutama jika para korban atau masyarakat merasa bahwa penyelesaian non-yudisial tidak memadai atau tidak memenuhi harapan mereka. Namun, perlu dicatat bahwa jika penyelesaian non-yudisial dianggap cukup memadai dan berhasil, hal ini dapat

mengurangi minat dan motivasi para korban untuk menempuh jalur yudisial, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi upaya penegakan hukum di masa depan.

## **B. Saran**

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis simpulkan, maka dapat diberi saran sebagai berikut :

1. Diperlukan perluasan sosialisasi dan pemahaman tentang Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022. Untuk memastikan bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 dapat berfungsi dengan efektif sebagai instrumen penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia berat, sangat penting bagi pemerintah untuk melaksanakan program sosialisasi yang lebih luas. Program ini harus mencakup penjelasan yang mendalam mengenai mekanisme penyelesaian non-yudisial yang diatur dalam Keppres tersebut. Selain itu, melibatkan masyarakat dan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam pembuatan kebijakan dan mekanisme tersebut dapat memberikan transparansi dan meningkatkan kepercayaan publik kepada proses penyelesaian yang ditawarkan.
2. Diperlukan Pengembangan Mekanisme Evaluasi untuk Pendekatan Non-Yudisial. Penting bagi lembaga terkait untuk mengembangkan mekanisme evaluasi yang sistematis dalam menilai efektivitas penyelesaian non-yudisial melalui Keputusan Presiden. Mekanisme evaluasi ini harus dirancang untuk mengumpulkan umpan balik dari korban dan masyarakat secara menyeluruh mengenai apakah penyelesaian yang dilakukan telah memenuhi harapan mereka. Dengan analisis yang terus-menerus dan responsif terhadap kebutuhan korban, pemerintah akan dapat menyesuaikan strategi dan pendekatan penyelesaian yang lebih tepat dan adil, sambil tetap menjaga jalur yudisial sebagai alternatif bagi mereka yang merasa perlu menempuhnya.